

Judul : MBG kembali berjalan, komisi x DPR minta perbaiki tata kelola
Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

MBG Kembali Berjalan Komisi IX DPR Minta Perbaiki Tata Kelola

FOTO TED RNI



Yahya Zaini

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik kembali dijalanannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Diharapkan, pelaksanaan tahun ini disertai perbaikan tata kelola serta pengawasan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). "Supaya tidak ada lagi kasus keracunan, sesuai janji BGN," ujar Yahya, Rabu (7/1/2026).

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi serentak pada 8 Januari 2026. Seluruh dapur tersebut ditargetkan melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Yahya mendorong perluasan cakupan MBG pada 2026. Jumlah SPPG diharapkan bisa mencapai 30 ribu unit dengan penerima manfaat sekitar 82 juta jiwa. Saat ini, SPPG yang beroperasi telah menembus 19 ribu unit dan melayani sekitar 54 juta orang.

Selain itu, ia menyoroti ramainya narasi di media sosial terkait minuman rasa susu impor dari China yang diklaim masuk dalam paket MBG di salah satu SPPG. BGN kudu memperketat pengawasan impor pangan. "Pastikan semua bahan makanan dan minuman adalah produk lokal," tegas politikus Golkar tersebut.

Menurutnya, prioritas pada produk dalam negeri akan

menggerakkan perekonomian daerah dan memberi dampak langsung bagi pelaku usaha serta pemasok lokal yang terlibat dalam program MBG.

Terkait pelaksanaan MBG selama bulan puasa pada Februari mendatang, Yahya meminta BGN menata ulang pola distribusi. Pembagian makanan bisa dilakukan menjelang jam pulang sekolah atau tidak pada waktu istirahat siang. "Supaya makanan tetap segar saat berbuka puasa," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi komitmen BGN menjadikan peningkatan kualitas layanan SPPG sebagai fokus utama. Ini dilakukan setelah pembangunan fondasi program dilakukan secara masif sepanjang 2025.

Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, mencapai lebih dari 55 juta anak dan kelompok sasaran lainnya, Netty menilai kesiapan layanan di tingkat SPPG menjadi kunci keberhasilan MBG. "Program ini bukan hanya soal skala, tetapi juga soal mutu dan keamanan pangan," katanya.

Ia mengapresiasi capaian pembangunan lebih dari 19 ribu SPPG sepanjang 2025, namun menekankan bahwa implementasi nasional menuntut konsistensi standar layanan di seluruh daerah. Kesiapan operasional setiap SPPG harus dipastikan, mulai dari kebersihan dapur, kualitas menu, kesiapan sumber daya manusia, hingga mekanisme distribusi yang aman dan tepat sasaran.

Netty juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Mengingat MBG merupakan program dengan anggaran besar dan berdampak langsung pada kesehatan anak, pengawasan harus dilakukan secara kuat dan konsisten. "Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tujuan program tercapai optimal," tandasnya. ■ TIF